

Strategi Kontra Terorisme Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Perspektif *Irregular warfare*

[Counterterrorism Strategies of Indonesia's National Counterterrorism Agency (BNPT) in by *Irregular Warfare* Perspective]

Anis Sujudi^{1)*}, Rita Arisandy²⁾, Denda Devi Sarah Mandini³⁾, Arya Ananta Wijaya⁴⁾

Universitas 45 Mataram

sujudiompok@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisa bagaimana startegi konter terorisme Badan Penanggulangan Terorisme di Indonesia (BNPT) dalam perspektif *irregular warfare*. Terorisme merupaka upaya menggunakan metode kekerasan untuk mencapi tujuan politk, dan digunakan oleh entitas kekuatan yang lebih kecil yaitu non negara kepada yang lebih besar seperti negara, Indonesia merupakan negara yang memiliki runtutan serangan teroris yang hampir terjadi setiap tahun, dan selalu megalami perubahan baik dari bentuk organisasi, afiliasi, target serangan, bentuk serangan dan cara rekrutmen. Perubahan yang terjadi begitu cepat dalam pergerakan terorisme membuat BNPT harus memiliki strategi yang bisa mengakomodi semua kemungkinan perubahan yang terjadi dalam pergerakan terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder dan primer bersumber dari tinjauan pustaka berupa buku, jurnal dan artikel berita online. Hasil penelitian mendeskripsikan BNPT memiliki dua startegi pendekatan yang digunakan dalam menjalankan kebijakan konter terorisme diantaranya *soft approach* ini merupakan bentuk pencegahan terorisme dan radikalisis, kemudian *hard approach* ini pendekatan menekankan pada penegakan perundang-undangan yang tealah mengatur terkait tindakan terorisme, kemudian ada pendekatan starategi tambahan yaitu dengan menggunakan *multisectoral approach* pendekatan ini sebagi tambahan untuk membatasi ruang aksi terorisme dan radikalisis, terutama terkait pendanan, rekrutman, mobilisasi dan lain-lain.

Kata kunci: Terorisme; Kontra terorisme; Irregural warfare; BNPT; *soft approach*; *hard approach*; *multisectoral approach*.

ABSTRACT

This paper analyzes the counterterrorism strategies implemented by the National Counterterrorism Agency (BNPT) by irregular warfare. Terrorism is the use of violent methods to achieve political objectives, carried out by small-scale non-state actors against larger entities such as the state (irregular warfare). Indonesia is a country that has experienced a series of terrorist attacks occurring almost every year, and these attacks continue to evolve in terms of organizational structure, affiliations, targets, methods of attack, and recruitment tactics. The rapid pace of change in terrorist activities requires the BNPT to adopt strategies capable of accommodating all possible shifts in the nature of terrorism in Indonesia. This study employs a descriptive qualitative approach, utilizing secondary and primary data derived from a literature review comprising books, journals, and online news articles. The result describes that BNPT employs two main strategic approaches in implementing counterterrorism policy: the "soft approach," which focuses on preventing terrorism and radicalization, and the "hard approach," which emphasizes the enforcement of existing laws related to terrorist acts. In addition, there is a complementary strategic approach known as the "multisectoral approach," which serves to further limit the scope of terrorism and radicalization particularly with regard to financing, recruitment, mobilization, and other related activities.

Keywords: Terrorism; Counterterrorism; Irregural warfare ; BNPT; *soft approach*;; *hard approach*; *multisectoral approach*.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ilmu strategi, dari strategi klasik menuju strategi moderen banyak yang menanyakan, apakah strategi moderen itu ada?, dari sejarah strategi perang dan militer, terlihat jelas perubahan strategi didorong oleh kemajuan teknologi dari masa ke masa, sehingga membuat perkembangan strategi menjadi meluas, terutama terkait medan perangnya (*battlefield*) yang dulunya hanya di darat kemudian bergeser ke air dan udara, yang kemudian juga meluas ke *cyber war*, itu semua diakibatkan kemajuan teknologi yang berpengaruh ke alat tempur dan armada tempur yang awalnya masih terbatas.

Dalam perkembangan teknologi banyak orang beranggapan kepastian dalam strategi perang menjadi lebih pasti, terukur dan rasional dari sebelumnya. membuat strategi hanya dipahami sebagai taktik, atau dipahami sebagai teknik perang, bukan lagi perang sebagai seni sebagaimana strategi perang klasik sebelumnya. meskipun begitu strategi perang tetap dan esensial peranya, ini sejalan dengan Gray (1999) yang melihat perang klasik dan moderen hanya terjadi pergeseran objek strategi dan aktor dalam *regular warfare* (Negara) dan *irregular warfare* (non-negara), tetapi strategi dan perang menurutnya tetap sama.

Meskipun semua perang tetap sama, Irregular warfare sendiri menandai perang post moderen dengan aktor baru non negara seperti terorisme yang mengubah cara pandang tentang strategi perang menjadi lebih konfleks. Irregular warfare yang konflek melibatkan banyak elemen penting, seperti waktu (time), ruang (space), dukungan (support) dan legitimasi (legitimacy) (Kiras 2019). Dalam terorisme waktu atau durasi serangan tidak lagi bicara tahunan tapi dekade, jika melihat dari serangan bom Bali 1 sampai sekarang, serang teroris masih eksis meskipun dengan intensitas dan bentuk serangan yang beragam. Kemudahan ruang (space), serangan terorisme tidak bisa diukur kapan dan dimana serangan tersebut dilakukan. kemudian dukungan (support) terorisme meliputi dukungan finansial dan rekrutmen anggota dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terorganisir di lokal dan internasional, selain itu juga opini publik tetap dijaga baik untuk menunjukkan rasa simpati atau rasa takut terhadap ancamannya. Terakhir legitimasi (Legitimacy), ini didapatkan oleh terorisme dengan menunjukan moral dan nilai-nilai yang mereka perjuangkan, sebagai legitimasi tindakan kekeasan yang mereka lakukan.

Tujuan terorisme ialah tujuan politis, dengan menghadirkan ketakutan dan ancaman luas (Kitzen 2020), yang berimplikasi kepada perubahan kebijakan negara. Kekuatan negara yang besar tidak serta-merta memastikan kemampuan dalam menanggulangi ancaman teroris yang memiliki kekuatan terbatas. Sehingga strategi yang tepat penting untuk diterapkan dalam kontra-terorisme. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana strategi badan penanggulangan terorisme (BNPT) dalam kontra terorisme dalam perspektif *irregular warfare*, sehingga dengan begitu strategi BNPT harus meliputi tujuan (*ends*) melalui cara-cara (*ways*) dengan menggunakan sumber daya yang tersedia (*sources*) sambil memperhitungkan risiko (Yarger 2006).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka. Data sekunder dan data primer yang disajikan dalam penelitian bersumber dari jurnal, buku, berita online dan dokumen lainnya. Penelitian berupaya mendeskripsikan data sekunder dan primer dengan menganalisa strategi BNPT dalam kontra terorisme di Indonesia dengan perspektif *irregular warfare*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Irregular Warfare : Terorisme di Indonesia

Irregular warfare mendefinisikan perang dan ancaman negara menjadi lebih berbeda, karena sifat ancaman, aktor (non-negara) dan karakter yang berbeda seperti terorisme. Terorisme sendiri menurut James D Kiras (2008) merupakan penggunaan kekerasan dengan target negara atau sipil oleh kelompok-kelompok kecil untuk tujuan politik.

Terorisme di Indonesia telah berhasil memberikan pengaruh politik sebagaimana tujuan dari terorisme tersebut, dan itu terlihat jelas dari awal terjadinya serangan terror pada bom Bali I, pemerintah Indonesia dengan sigap membentuk badan penanggulangan terorisme (BNPT) pertama untuk menanggulangi isu ini, pembentukan BNPT menggambarkan pendekatan yang dilakukan Indonesia berbeda dengan ancaman dari negara lain yang militeristik. Jika melihat dari teror bom Bali I Jammah Islamiah (JI) pimpinan Abu Bakar Baasir memiliki peran signifikan dalam lahirnya serangan teror berikutnya, JI sendiri sering dikaitkan dengan organisasi terorisme transnasional seperti al-qaeda (Baker 2005). Jika berbicara gerakan Islam radikal di Indonesia memiliki sejarah panjang semenjak masa penjajahan Belanda, sehingga benih islam radikal yang ada di Indonesia mudah tumbuh kembali (Indonesia Investments 2018), selain itu simpatisan dari serangkaian gerakan teror yang terjadi juga berpotensi menjadi regenerasi gerakan radikal yang akan datang, selain itu konflik antara umat beragama yang terjadi di Indonesia juga sangat berpotensi untuk melahirkan generasi muda yang radikal.

Penyebaran aliran radikal dan fundamental setelah reformasi menjadi titik awal pergerakan radikalisme dan ekstrimis di Indonesia, seiring dengan itu lahirnya organisasi fundamental yang militant juga begitu mudah terjadi di Indonesia (Bruinessen, 2000), meskipun gerakan ormas ini sebelumnya hanya gerakan fundamental dan militant biasa akan tetapi setelah terjadinya 9/11 seakan menjadi *spillover* tidak hanya bagi negara barat dan akan tetapi negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia juga menghadapi ancaman dari terorisme. Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim juga tak terhindari serangan terorisme, yang terjadi berselang setahun setelah 9/11 yaitu serangan bom Bali I di Indonesia dan runtutan aksi teror yang lain. Gerakan radikal dan ekstrimis ini ingin mendirikan negara Islam yang dikenal dengan Khilafah, yang berlandaskan Islam, dan menganggap sistem demokrasi yang dianut oleh pemerintah Indonesia harus dilawan, demi berdirinya Khilafah.

Jika merujuk ke *Irregular warfare* yang digunakan untuk mengkalsifikasikan teror dan perlawanan yang dilakukan oleh terorisme, sudah bisa diidentifikasi sebagai perlawanan kelompok terorisme kecil yang berafiliasi dengan beberapa kelompok terorisme trans-nasional seperti JI, JAT yang berafiliasi Alqaeda dan JAD yang berafiliasi dengan ISIS, meskipun jaringan mereka lintas batas negara akan tetapi mereka tetap dianggap sebagai kelompok kecil, mengingat mereka hanyalah entitas kecil dibandingkan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan keamanan yang besar.

Perubahan gerakan Islam radikal dari Al-qaeda dan yang terbaru ISIS yang dianggap selalu memiliki hubungan yang relative kuat dengan para jihadis yang berada di Indonesia, yang terbaru-baru ini Indonesia BNPT menyatakan sekitar 500-700 orang Indonesia telah bergabung dengan ISIS termasuk perempuan dan anak-anak (Ressa, 2015). Indonesia menjadi harapan tanah subur bagi mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Semenjak terjadinya reformasi 1998 serangan terorisme hampir terjadi setiap tahun dari tahun 2000 sampai sekarang dan serangan yang dilakukan bervariasi dari tahun ketahun dan hampir seluruh wilayah Indonesia dari Indonesia Timur, Tengah dan Barat mereka memiliki jaringan yang kuat dan teroganisir dengan baik dan terselubung.

Rekrutmen anggota untuk melakukan teror menjadi begitu penting dilakukan demi berlansungnya tujuan politik yang ingin dicapai, kemudian tetap bisa eksis dan bisa memperjuangkan tujuan politiknya, proses rekrutmen teroris di Indonesia mengalami beberapa tahapan berdasarkan hemat penulis dan terus bertransformasi dari tahun ke tahun. Pertama rekrutmen yang bersifat perorangan yang mana kebanyakan menarik perhatian anak muda untuk ikut menjadi bagian dari mereka, dan terjadi kecenderungan yang di rekrut hanya laki-laki dan ini merupakan fenomena rekrutmen terorisme pertama yang terjadi di Indonesia, kemudian yang kedua rekrutmen terorisme yang bersifat tidak terbatas, rekrutmen terorisme yang tidak terbatas tersebut difasilitasi oleh kemajuan teknologi yang ada saat ini, ISIS merupakan salah satu contoh yang berhasil menggunakan teknologi sebagai alat rekrutmennya, itu terlihat dari tidak hanya pemuda yang menjadi target mereka, akan tetapi pemuda-pemudi juga menjadi target rekrutmen mereka, sehingga semakin ke sini terorisme melakukan rekrutmen tidak terbatas pada gender atau jenis kelamin, dan kemudian dari segi jumlah dengan adanya teknologi rekrutmen anggota terorisme juga ikut berkembang, yang dulu rekrutmennya bersifat perorangan dan sekarang di satu keluarga bisa direkrut sebagai anggota mereka (Ressen, 2015).

Serangan bom Surabaya 2018 yang lalu memperlihatkan secara jelas terjadinya perubahan perekrutan teroris, pelaku dari bom Surabaya merupakan satu keluarga yang terdiri dari beberapa anggota, dan mereka bukan dari kalangan keluarga dengan kesulitan ekonomi mengingat mereka merupakan keluarga yang berada (Wicaksono, 2018), perubahan ini memperlihatkan anomali yang mana biasanya sebagai orang tua ibu atau bapak akan melindungi anaknya dari bahaya dan ancaman, sehingga pola perekrutan terorisme menjadi penting ditanggulangi dengan baik dan tepat.

Selain cara perekrutan yang berbeda terorisme di Indonesia juga mengalami perubahan bentuk gerakan dari Jemmah Islamiyah yang kemudian menyebar menjadi kelompok baru dan tetap berafiliasi dengan kelompok terorisme Internasional, dan ini yang membedakan gerakan terorisme post modern, yang mana sebelumnya terorisme hanya bersifat lokal akan tetapi sekarang sudah trans-nasional, gerakan terorisme trans-nasional ini merupakan bentuk keberhasilan dari Al Qaeda sebagai pencetus gerakan teroris trans-nasional, perubahan gerakan terorisme di Indonesia yang dulu pada awal 2000an banyak orang mengenal Jemmah Islamiyah dan yang terbaru sekarang Jemmah Anshorut Daulah (JAD), yang berafiliasi dengan ISIS dalam gerakannya di Indonesia, berbeda dengan JI dengan JAD, dan JAD dianggap lebih berbahaya dibandingkan dengan JI sebelumnya (The Strategist 2018).

Jika mengatakan gerakan terorisme trans nasional kebanyakan diantara kita mengingat Al Qaeda hal itu sangat beralasan mengingat banyak teror yang terjadi di luar negeri dan dalam negeri diasosiasikan dengan gerakan mereka, akan tetapi dalam beberapa tahun ini jika ditanya siapa yang paling masif dalam melakukan rekrutmen, semua orang sepakat pasti menjawab ISIS, pola rekrutmen yang dilakukan ISIS dan Al Qaeda sangat berbeda mengingat Al Qaeda melakukan rekrutmen hanya terbatas pada laki-laki, akan tetapi ISIS memberikan peluang sekaligus ancaman, yang mana ini menjadi peluang bagi perempuan atau bahkan satu keluarga yang sudah terkena virus ideology radikal untuk bisa berkontribusi dalam berbagai teror, dan menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan akan mengalami kesulitan yang lebih dalam mengidentifikasi siapa yang teroris dan siapa yang bukan, sehingga untuk menanggulangi ini diperlukan strategi kontra terorisme yang bisa menjangkau semua kalangan tanpa terkecuali.

Serangan terorisme dari awal hingga sekarang sudah mengalami transformasi yang begitu variatif baik dari metode teror yang digunakan hingga target dari teror tersebut, yang mana pada awalnya metode teror yang digunakan kelompok teroris di Indonesia bisa dikatakan moderen yaitu seperti penggunaan bom berdaya ledak tinggi, yang bisa memakan banyak korban jiwa, kasus bom Bali merupakan teror pertama dengan daya ledak bom yang tinggi, bom itu berbahan RDX (*Cyclotrimethylenetrinitramine*) dan TNT (*Trinitroloene*) (Liputan6 2002) sehingga bom Bali merupakan serangan teror dengan korban mati dan terluka terbanyak, dari serangkaian serangan teror bom setelahnya, semakin kesini serangan teror menggunakan bom dengan daya ledak yang lebih kecil, dan bahkan serangannya dilakukan dengan melakukan kontak langsung dengan aparat. Serangan 2016 di Sarinah Jakarta merupakan kombinasi serangan teror dengan bom dan kontak langsung dengan aparat kepolisian (Kompas 2016).

Kemudian serangan terorisme baru-baru ini terjadi di Kapolda Riau yang menggunakan katana atau pedang samurai sebagai alat teror (detik 2017). dengan terjadinya perubahan bentuk serangan teror yang dilancarkan teroris, yang mulai menggunakan persenjataan yang *low cost* membuat tindakan teroris berpotensi terjadi kapan saja dan dengan apa saja, sehingga meskipun terkendala pendanaan untuk melakukan teror, serangan teror akan tetap terjadi, dengan persenjataan yang tak diduga dan tak sama seperti serangan teror yang cenderung menggunakan bom.

Selain perubahan bentuk serangan teror yang digunakan dalam terorisme di Indonesia, target serangan terorisme juga ikut berubah, yang awalnya menyasar apa-apa yang berbau barat yang ada di Indonesia, seperti tempat wisata (kasus bom Bali), Investasi asing (bom JW Marriott) dan Kedutaan Besar (Australia). Sehingga pada awalnya terorisme pada awalnya hanya terbatas kepada apa yang berbau barat akan tetapi seiring dengan perkembangannya dan terjadi pecahan kelompok teroris menjadi kelompok kecil-kecil, serangannya target serangan teror juga ikut berubah, seperti menyasar tempat public dan menyasar apart keamanan terutama polisi. Jika dilihat dari awal kecenderungan pola serangan yang hanya menarget orang dengan kepercayaan agama yang berbeda dan simbol-simbol barat yang ada di Indonesia, akan tetapi sekarang polanya berubah dengan melakukan serangan kepada instansi tertentu tanpa melihat target tersebut dari keyakinan dan merepresentasikan simbol

barat. Dari perubahan yang terjadi ini membuat ketidak pastian dari serang teror semakin sulit untuk ditangani dikarenakan semua orang berpotensi menjadi korban dari serangan teror yang dilancarkan.

Strategi Kontra Terorisme Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) pertama kali dibentuk setelah bom Bali I terjadi, pembentukan BNPT ini didasarkan instruksi presiden no 4 tahun 2002, BNPT merupakan lembaga yang diamanahkan untuk mengatur membuat kebijakan dan strategi nasional terkait penanggulangan terorisme. lahirnya BNPT tidak lain dan tidak bukan untuk menyikapi *Irregular warfare* yang dilakukan oleh teroris, yang mana ketidak pastian lebih tinggi dan menjadi ancaman bersama karena tidak hanya menyasar negara akan tetapi rakyat sipil juga, tugas yang kedua Mengkoordinasikan instansi yang ikut bekerja dengan BNPT terkait penanggulangan terorisme seperti kepolisian, kemudian yang ketiga ialah melaksanakan kebijakan yang dibuat terkait penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas dari unsur instansi pemerintah yang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Bidang penanggulangan terorisme yang diatur BNPT terkait perlindungan, pencegahan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional (BNPT 2017).

Tujuan dari BNPT adalah pemberantasan terorisme untuk melindungi warga negara Indonesia dan kepentingan nasional, dan membuat lingkungan nasional dan internasional tetap damai dan tidak menyuburkan radikalisme dan menghilangkan terorisme, sedangkan visi dari BNPT menyadari ancaman terorisme merupakan ancaman yang nyata yang dapat mengganggu stabilitas berbangsa dan bernegara, sehingga dibutuhkan upaya komprehensif yang mencakup peningkatan secara operasional, proteksi (perlindungan), pencegahan, penanganan masalah dan upaya deradikalisasi, sedangkan misi yang diemban BNPT adalah pengupayaan pemberantasan terorisme melalui yang pertama mencegah terorisme dengan mengidentifikasi faktor yang dapat menyebabkan terorisme, memberantas terorisme dengan mengalahkan organisasi terorisme dengan menghancurkan persembunyiannya, kepemimpinan, komando, kontrol, komunikasi dan dukungan materil, kemudian yang ketiga meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap ancaman serangan terorisme dan yang terakhir melindungi prasarana vital dari serangan terorisme (Sari, 2016).

Dari tujuan, visi dan misi terbentuknya BNPT sudah jelas diproyeksikan sebagai badan strategis yang mengemban mandat untuk penanggulangan kasus terorisme di Indonesia, akan tetapi dengan tujuan, dan visi misi yang diusung belum cukup untuk menangani permasalahan terorisme sehingga BNPT membutuhkan strategi yang bisa menjabarkan kebijakan-kebijakan strategis terkait kontra terorisme tidak hanya untuk saat ini akan tetapi untuk jangka waktu yang panjang.

Pengaruh dan ancaman terorisme. Perubahan bentuk perekrutan dan serangan terorisme juga menuntut BNPT untuk memiliki strategi yang lebih bisa mengakomodasi semuanya demi tercapainya kebijakan kontra terorisme yang diharapkan. Strategi yang ditawarkan BNPT dalam upaya kontra terorisme di Indonesia melalui beberapa pendekatan yang pertama *soft approach* (pencegahan), *hard approach* (penindakan) dan **Multisectoral approach**. *Soft approach* (pencegahan) cara ini coba dilakukan BNPT sebagai langkah awal untuk memotong atau menghentikan pengaruh radikalisme dan terorisme yang sudah menyebar di masyarakat, salah satu cara yang digunakan adalah BNPT merekrut duta social media damai yang bisa memberikan upaya kontra radikalisme terhadap ideology radikal yang tak bisa terelakkan telah mempengaruhi generasi muda saat ini, selain itu BNPT juga membuat kebijakan yang untuk melibatkan para mantan kombatan terorisme dalam upaya deradikalisasi, dan juga bekerja sama dengan beberapa ormas seperti Muhammadiyah dan NU (BNPT 2017).

Kemudian melalui penindakan (*hard approach*) BNPT berusaha untuk menegakan hukum dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, pendekatan *hard approach* ini merupakan pendekatan untuk menjamin keamanan dari ancaman terorisme, dalam hal ini BNPT juga bekerja sama dengan kepolisian dan TNI sesuai dengan fungsi instansi masing-masing, dalam beberapa upaya kontra teroris TNI juga mulai mengambil peranan yang penting, seperti upaya pemburuan kelompok Santoso dan Mujahidin Indonesia Timur di Sulawesi (BBC 2016), upaya ini sebagai bentuk sinergi yang diupayakan BNPT dalam mengujutkan kebijakan kontra teroris yang diemban, baru-baru ini setelah serangan teror yang terjadi di Surabaya, Sidowarjo dan Riau ada wacana untuk mengikut setakan TNI dalam penanggulangan

kasus terorisme, hal ini dikarenakan terorisme yang terjadi selama ini di Indonesia telah mengancam keamanan nasional, sehingga melibatkan TNI sebagai garda terdepan dalam pertahanan Indonesia dianggap menjadi perlu. *Multisectoral approach* digunakan untuk memperkecil ruang gerak terorisme seperti pendanaan, penyebaran ideologi mereka melalui media sosial dan lain-lain, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan kementerian komunikasi dan informasi, kementerian agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kementerian keuangan dan lain-lain. Upaya ini dilakukan mengingat BNPT tidak bisa sendiri dalam melaksanakan kebijakan kontra terorisme, sehingga dibutuhkan kerjasama antara kementerian terkait yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mencegah kegiatan terorisme dalam wadah yang diatur oleh masing-masing kementerian (Gutierrez, 2016).

Perekrutan dan ancaman terorisme yang begitu masif, tak terlihat dan tak bisa dideteksi secara mudah membuat BNPT perlu memiliki pendekatan untuk menangani masalah terorisme secara komprehensif, yaitu melalui pendekatan seperti yang dipaparkan di atas. *Soft approach*, *hard approach* dan *multisectoral approach* yang digunakan BNPT merupakan hasil dari identifikasi fenomena terorisme yang terjadi di Indonesia saat ini, yang mana fenomena terorisme dibarengi dengan penyebaran ideologi radikal, sehingga untuk kontra terorisme bisa berhasil tidak hanya cukup dengan penindakan dan menuntut hukum yang berlaku bagi pelaku terorisme, dan untuk menjamin tindakan radikalisme dan terorisme itu terjadi sehingga upaya *soft approach* tadi digunakan agar para narapidana dan mantan narapidana terorisme tidak kembali menyebarkan ideologi radikal yang pernah mereka anut, kemudian pendekatan *multisector approach*, pendekatan ini sebenarnya tidak diketahui secara luas akan tetapi pendekatan ini dilakukan BNPT untuk meminimalisir gerak terorisme dan penyebaran ideologi radikal melalui kerjasama dengan beberapa kementerian yang mengurus bidang yang berpotensi sebagai wadah penyebaran ideologi mereka ataupun teror mereka, dan ini merupakan upaya yang diharapkan efektif bisa sebagai strategi kontra terorisme yang diharapkan oleh BNPT (BNPT, 2017).

Penanggulangan terorisme yang terjadi di Indonesia menjadi penting mengingat ancaman dan perekrutan terorisme di Indonesia cenderung lebih mudah mengingat Indonesia memiliki potensi untuk terjadinya serangan terorisme dan perekrutan. Sehingga BNPT harus berupaya untuk membuat Strategi yang bisa mencegah risiko terorisme yang lebih besar. Seperti yang dipaparkan sebelumnya strategi itu merupakan proses untuk mencapai tujuan (*ends*) dengan melalui cara-cara (*ways*) penggunaan sumberdaya (*means*) yang dimiliki dan memperhitungkan risiko. Sehingga BNPT berdasarkan apa yang dijelaskan pada paragraf di atas memperlihatkan tiga hal dalam strategi yaitu *ends*, *ways* dan *means* telah coba dilakukan untuk tercapainya kontra terorisme yang efektif.

Permasalahan terorisme bukan hanya permasalahan lokal akan tetapi permasalahan global yang menimpa setiap negara sehingga banyak negara saling membantu dalam penanggulangan terorisme seperti pendanaan, latihan dan lain-lain. Pendanaan untuk menjalankan kontra terorisme di Indonesia, pemerintah Indonesia dan BNPT khususnya mendapatkan gelontoran dana dari Amerika Serikat sekitar USD 262 juta dari tahun 2002 sampai tahun 2013, selain BNPT kepolisian juga mendapatkan bantuan untuk kontra terorisme mengingat di Indonesia polisi merupakan instansi keamanan yang memiliki hak lebih dalam menanggulangi permasalahan terorisme selama ini, selain Amerika Serikat, Australia juga memberikan bantuan dan pelatihan militer kepada kepolisian Indonesia untuk membantu penanggulangan terorisme di Indonesia sehingga melahirkan Detachment 88 yang beranggotakan polisi penanggulangan isu ancaman terorisme, banyak pihak yang mengira peran Australia dalam pembentukan Detachment 88 dilandaskan pada kejadian bom Bali I serangan bom di kedutaan besar Australia di Jakarta (Dodwell and Ness 2015).

Kerjasama dengan pihak seperti ini juga merupakan salah satu bentuk strategi kontra terorisme yang diharapkan efektif memberikan sumbangsi mengingat pendekatan ini juga memberikan pelajaran bagi penanggulangan terorisme di Indonesia. Tidak hanya dengan Amerika dan Australia BNPT juga bekerjasama dengan pihak lain yang juga fokus dalam kontra terorisme di masing-masing negara mereka. Kebijakan yang strategis seperti ini perlu diimplementasikan dengan baik juga oleh BNPT, mengingat Terorisme begitu cepat bermetamorfosis dalam berbagai hal, dari cara rekrutmen, pendanaan, serangan. Ketidakpastian serangan teror, dan cara perekrutan yang sulit dipenetrasi melalui media Internet, kemudian siapa yang akan diserang dan kapan penyerangan itu akan dilakukan membuat tiga strategi yang dijalankan BNPT diharapkan bisa menanggulangi permasalahan terorisme dan memotong arus radikalisme yang berpotensi melahirkan gerakan terorisme baru.

PENUTUP

Simpulan

Terorisme merupakan upaya penggunaan metode kekerasan untuk mencapai tujuan politik, yang biasa digunakan oleh kekuatan kecil untuk melawan kekuatan besar untuk mengubah kebijakan politik, isu terorisme menjadi isu global tidak hanya di negara dengan mayoritas non muslim akan tetapi juga menjadi permasalahan bagi negara dengan penduduk muslim seperti Indonesia, isu terorisme merupakan isu yang cukup lama terjadi di Indonesia akan tetapi pergerakan terorisme mulai masif pasca reformasi, yang mana pada saat ideology fundamental mulai subur tumbuh di Indonesia. Terorisme secara akademik dikategorikan sebagai *Irregular war*, karena aktor yang saling berlawanan tidak memiliki entitas kekuatan yang sama (antara negara dan non-negara).

Untuk menanggulangi kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia membentuk Badan penanggulangan terorisme (BNPT), sebagai wujud konter terorisme di Indonesia, dalam menjalankan kebijakan konter terorisme BNPT memiliki strategi untuk menjalankan kebijakan tersebut melalui dua pendekatan yaitu *soft approach* (pencegahan) upaya ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap lahirnya gerakan atau regenerasi teroris baru, kemudian pendekatan *hard approach* (penindakan) pendekatan ini digunakan sebagai bentuk pengamanan terhadap keamanan nasional dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, sedangkan ada satu strategi tambahan yang diberlakukan BNPT yaitu *Multisectoral approach* yaitu pendekatan ini diberlakukan demi membatasi ruang gerak terorisme, baik itu dari segi pendanaan, rekrutmen dan lain-lain, dalam hal ini BNPT bekerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga yang ada dipemerintahan, karena dalam mengimplemetasikan kebijakan kontra terorisme BNPT tidak bisa menjalankannya sendiri.

Saran

BNPT sebagai lembaga strategis negara dalam penanggulangan kontra terorism, harus mampu mengakomodasi kepentingan kelompok rentan dan mantan teroris agar bisa berintegrasi dengan masyarakat secara luas, demi memastikan deradikalisasi tidak hanya terbatas pada pelemahan doktrin, tetapi memastikan kesejahteraan ekonomi, sosial dan pendidikan mereka, guna memperkuat kontra terorisme dari akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker C John. (2005). *Jannah Islamiah : Aptitude For Destruction Volume 2: Case Studies Of Organizational Learning In Terrorist Groups And Its Implications For Combating Terroist*. RAND.
- BNPT. (2018).” n.d. *Badan Nasional Penanggulangan Terorisme*. Accessed June 13, 2018. <https://www.bnpt.go.id/tentang-bnpt>.
- Bruissen V Martin. (2002). *Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia*. n.d. 38.
- Colin Gray, (1999). *The Grammar of Strategy I: Terrestrial Action*. Dalam *Modern Strategy*, Oxford, University Press,.
- DETIK. (2018). “Polda Riau Diserang Terduga Teroris, 2 Polisi Terluka.” Accessed June 14, 2018. <https://20.detik.com/detikflash/20180516-180516016/polda-riau-diserang-terduga-teroris-2-polisi-terluka>.
- Dodwell, Brian, etl. (2015). “A View from the CT Foxhole.” . . *Vol 8 (2)*: 21.
- Indonesia Invesment.(2018). “Islam Radikal Di Indonesia - Islamisme | Indonesia Investments.” n.d. Accessed June 14, 2018. <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/islam-radikal/item245?>
- KIRAS, JAMES D. (2019). *Irregular Warfare: Terrorism and Insurgency*. 23.
- Kitzen, Martijn. (2020). “Operations in Irregular Warfare.” In *Handbook of Military Sciences*, edited by Anders McD Sookermany. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02866-4_81-1.
- Kompas Cyber. (2016). “Ini Kronologi Serangan Teror di Kawasan Sarinah Versi Polda Metro Jaya.” KOMPAS.com, January 15. <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/0>

- Liputan6.com. (2002). "Bahan Peledak Bom Bali dari Luar Negeri." liputan6.com. Accessed June 14, 2018. <https://www.liputan6.com/news/read/43335/bahan-peledak-bom-bali-dari-luar-negeri.1/15/06570011/Ini.Kronologi.Serangan.Terror.di.Kawasan.Sarinah.Versi.Polda.Metro.Jaya>.
- Rappler. (2015). 4 Things You Need to Know about ISIS in Indonesia." n.d. Accessed June 13, 2018. <https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/bahasa/englishedition/113708-isis-indonesia-facts-terrorism>.
- Rappler. (2018). "Why Indonesia's New Counterterrorism Strategy Could Be Its Best yet." Accessed June 13, 2018. <http://www.rappler.com//world/regions/asia-pacific/indonesia/bahasa/englishedition/148953-counterterrorism-bnpt-suhardi-alius>.
- Yarger, Harry R. (2006). *Strategic Theory for the 21st Century*. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, US Army War College.
- Republika. (2017). "Kepala BNPT Paparkan Strategi Nasional Penanggulangan Terorisme di Singapura." *Badan Nasional Penanggulangan Terorisme*, April 5. <https://www.bnpt.go.id/kepala-bnpt-paparkan-strategi-nasional-penanggulangan-terorisme-di-singapura.html>.
- The Strategist. (2018). "Indonesia's Most Dangerous Terrorist Group—the Rise of JAD." May 16. <https://www.aspistrategist.org.au/the-rise-of-jamaah-anshurat-daulah-indonesias-most-dangerous-terrorist-group/>.
- Wicaksono, Hendro. (2018) . *Analisis Kriminologis: Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya*.